

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran (*Role Theory*) menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang memiliki peran tertentu. Misalnya : sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya diharapkan agar seorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seorang dokter harus mengobati oranglain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.¹⁵

Gleen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia 4 atau 5 tahun, menjadi peserta pemilu pada usia 18 tahun, bekerja pada usia 17

¹⁵Aco Mussadad, *Anagguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat : Gerbang Visual, 2018), hal. 28 -29

tahun, mempunyai istri/suami pada usia 27 tahun, pensiun pada usia 60 tahun.¹⁶

Biddle memperkenalkan lima jenis peran, yang meliputi : 1. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional), yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil, 2. *Symbolic Interactionist Role Theory* (teori peran interaksional yang simbolis) yang memfokuskan pada peranan actor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan mengitrepresentasikan sebuah tingkah laku, 3. *Structural Role Theory* (teori peran stuktural) yang memfokuskan pada struktur sosial dan kedudukan sosial yangb sama sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditunjukkan pada kedudukan sosial pada sistem sosial hirarkies, yang berorientasi pada tugas yang belum direncanakan, 5. *Cognitive Role Theory* (teori peran kognitif) yang difokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran.¹⁷

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran (*Role Theory*) adalah persepektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan

¹⁶Aco Mussadad, *Anagguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar...*, hal. 30

¹⁷Ibid., hal. 31

sehari hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Teori peran adalah perpektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini dalam pergaulan itu sudah ada scenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.¹⁸

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.¹⁹

Adapun peran BUMDes secara umum antara lain:²⁰

- 1.** BUMDes sebagai Fasilitator, yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa.

¹⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990). hlm. 267.

¹⁹David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, (Pontianak: CV, DERWATI PRESS,2019), hlm.9.

²⁰David Prasetyo, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa...*, hlm.71.

2. BUMDes sebagai Mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang sudah ditetapkan.
3. BUMDes sebagai Motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir Badan Usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah Desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang BUMDes selanjutnya supaya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Sementara itu, menurut Seyadi BUMDes memiliki peran sebagai berikut:²¹

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

²¹Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 16.

5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

3. Teori kelembagaan

Definisi kelembagaan dapat dipilih dalam 2 klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.²²

Bumdes sebagai institusi baru ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola BUMDES harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi pendirian BUMDES perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadi BUMDES rentan akan konflik.²³

4. Pembangunan Pedesaan

Pembangunan (*development*) merupakan suatu perubahan kebudayaan serta terencana, Pengertian secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (*sosial plan*) yang dilakukan oleh perencana pembangunan, untuk membuat perubahan sosial

²²Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan :Yayasan Kita Menulis, 2020), cet 1, hlm. 76

²³Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa...*, hlm. 77

yang akhirnya akan mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.²⁴

Pembangunan dapat didefinisikan serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah. Misalnya: badan-badan, atau lembaga internasional, nasional, lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera dari pada sebelum adanya program pembangunan.²⁵

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan hasilnya.
- b. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan usaha berasaskan kemandirian lokal.

²⁴Eko Digdoya, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015). Hlm. 117.

²⁵Rahardjo Adisasmito, *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013). Hlm. 73.

²⁶Ginandjar Krtasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cinesindo, 1996), hlm. 392

- c. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan desa merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Menurut Haerumam (1997) ada dua sisi pembangunan pedesaan :²⁷

- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu intertaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.²⁸

Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai strategi pembangunan dengan upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya

²⁷Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2004). Hlm. 56.

²⁸Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, (Jakarta : BAPPENAS, 2004). Hlm. 14

serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.²⁹

Pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³¹

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam membangun masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan keterampilan, serta motivasi masyarakat agar mampu menjadi masyarakat yang lebih maju.

Pemberdayaan dapat diartikan baik sebagai tujuan maupun proses.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin

²⁹H. Syamsir Salam dan Amir Fadillah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 234.

³⁰Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana PranamediaGroup, 2013). hal. 43.

³¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa

dicapai, yakni klien yang memiliki kekuasaan atau keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe tipe kekuasaan. Menurut Suharto pemberdayaan sebagai proses memuat lima dimensi :³²

- a. Pemungkinan (*enabling*), yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi klien berkembang secara optimal.
- b. Penguatan (*empowering*), yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki klien dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- c. Perlindungan (*protecting*), yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak mudah tertindas dari kelompok-kelompok kuat, menghindari dari persaingan yang tidak seimbang (apalagi persaingan yang tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah.
- d. Penyokongan (*supporting*), yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar klien mampu menjalankan peranannya dan tugas tugas kehidupannya.
- e. Pemeliharaan (*fortering*), yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok dan masyarakat.

³² H. Syamsir Salam dan Amir Fadillah, Sosiologi Pedesaan), . . . hlm. 240

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³³

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP No 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.³⁴

b. Maksud dan Tujuan BUMDesma³⁵

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha mikro ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³³ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : KEMENDES, 2015). hlm. 11

³⁴ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa, (*Jakarta : Jurnal Administrasi Publik (JAP, 2017)*), Vol. 1, No. 6 hlm. 1068-1076.

³⁵ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016). hlm.. 2.

4. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa yang terbebas dari pengaruh perampasan uang/rentenir.
5. Meningkatkan pendapatan sumber asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Desa.

Bumdes dalam pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

c. Keuangan BUMDES³⁶

Ada tahap awal pendirian BUMDES, akan banyak pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDES didapatkan. Berikut adalah modal BUMDES Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

- 1) Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
- 2) Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan tidak terbagi atas saham

³⁶Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*,...hlm. 5.

- 3) Modal BUMDES terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal Desa
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa
- 4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya
- 5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. Dana segar
 - b. Bantuan pemerintah
 - c. Bantuan pemerintah daerah
 - d. Asset dan yang diserahkan kepada APB Desa
- 6) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

d. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

Jenis usaha yang dijalankan BUMDES yaitu :³⁷

1. Bisnis sosial/*servicing*

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan sampah dan sebagainya

³⁷Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, hlm.

2. Keuangan/*Banking*

Bumdes bisa membangun lembaga keuangan untuk warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

3. Bisnis penyewaan/*Renting*

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

4. Lembaga perantara/*Brokering*

Bumdes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga Bumdes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

5. Perdagangan/*Trading*

BUMDES menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi

kapal kapal di desa nelayan. Bumdes mendirikan Toko atau supermarket Bumdes untuk memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhannya lebih dekat.

6. Usaha bersama/ *Holding*

Bumdes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDES mengelola wisata Desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

7. Kontraktor/ *Contracting*

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa.

e. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES

Penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemplab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :³⁸

- a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

³⁸Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, (Jakarta : PP-RPDN, 2007), hlm. 7

- b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES
- c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- f) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- g) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

7. Penggerak Ekonomi

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi desa.

1) Peran Penggerak BUMDes :³⁹

- a. Turut membantu pemerintah desa dalam kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa
- b. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan
- c. Memperluas kesempatan kerja serta ikut memperkecil masalah pengangguran, kriminalitas, dan lainnya.
- d. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Sebagai mitra masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

2) Faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu :⁴⁰

a. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam merupakan faktor penentu dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai seperti tanah, udara, mineral, air tumbuhan, hewan, dll. Maka suatu kegiatan ekonomi dapat terlaksana jika dilihat dari sumber daya alam, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dimilikinya adapun peran dari sumber daya alam yaitu sebagai bahan dasar untuk semua produksi, dalam sumbernya sebagai berikut :⁴¹

³⁹Sukarno Wibowo, dan Desi Supri, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2013), Hlm. 17

⁴⁰Sukarno Wibowo, dan Desi Supri, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2013), Hlm. 19

⁴¹Ibid,...hlm. 21.

1. Dengan adanya sumber daya alam maka dapat menghasilkan suatu produk yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
2. Dalam penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan berbagai dampak yang akan terjadi kedepannya, karena banyak nantinya yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Jadi, antara besarnya sumber daya alam dan pertumbuhan suatu kegiatan ekonomi mempunyai keterhubungan. Semakin banyaknya sumber daya alam maka semakin majunya kegiatan ekonomi maka akan terjadi pengurangan sumber daya alam. Oleh karena itu haruslah mengatur sedemikian rupa dalam penggunaan sumber daya alam agar nantinya tidak akan terjadi kelangkaan.

b. Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya alam, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting yaitu sebagai orang yang menciptakan kegiatan ekonomi dan orang yang melakukan pembangunan dalam kegiatan ekonomi dapat berperan sebagai tenaga kerja seorang pengusaha, dan beberapa peran lainnya, yaitu :

- a) Dalam kegiatan ekonomi, tentunya sumber daya manusia dituntut untuk selalu mempunyai keterampilan dan meningkatkan kualitas.

b) Ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki sangat mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi di negaranya sendiri

Untuk terciptanya manusia yang berkualitas harus didasari kesadaran akan pentingnya pendidikan. Setidaknya kita harus menempuh pendidikan hingga sekolah atas menengah atau kejuruan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara.

c. Sumber Daya Modal⁴²

Ada tidaknya modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Untuk Negara maju tidak perlu diragukan lagi sumber daya modal yang mereka punya sangat mencukupi dalam proses kegiatan ekonomi. Dan sebaliknya Negara berkembang sangat membutuhkan banyak modal untuk proses kegiatan ekonominya. Salah satu upaya untuk mendapatkan sumber daya modal pada Negara berkembang yaitu dengan melakukan pembentukan dan juga pengembangan investasi.

⁴²Sukarno Wibowo, dan Desi Supri, *Ekonomi Makro Islam*, ...Hlm. 23.

8. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mereka memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁴³

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasisosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009). Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

⁴³Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

⁴⁴Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan nasional.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN terdapat 5 hal yang harus dipenuhi agar suatu keluarga disebut sebagai keluarga sejahtera. Beberapa hal tersebut yaitu:⁴⁵

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian
4. Bagian terluas lantai rumah bukan tanah
5. Bila anak sakit atau PUS (PasanganUsia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern

⁴⁵Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan2000*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), hlm. 4.

Dari beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai keluarga sejahtera diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:⁴⁶

a) Pendapatan

Kesejahteraan suatu penduduk atau tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kesempatan kerja, tetapi juga besaran upah/gaji yang diperoleh, karena menjadi penentu keadaan ekonomi pekerja. Upah/gaji merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atau jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang/jasa dalam suatu perusahaan. Upah/gaji yang diterima oleh setiap pekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Seorang pekerja dapat dikategorikan hidup layak/sejahtera apabila gaji yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Indikator gaji atau pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Tinggi (<Rp. 5.000.000) perbulan.
2. Sedang (Rp.1.000.000-Rp. 5.000.000) perbulan
3. Rendah (<Rp. 1.000.000) perbulan

b) Konsumsi Pengeluaran

Salah satu indikator yang menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk dengan melihat pengeluaran rumah

⁴⁶Subdirektorat indikator statistic, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 110-115.

tangga. Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser ke pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya jika permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Dengan kata lain suatu kesejahteraan bisa dicapai apabila presentase pengeluaran untuk non makanan $< 80\%$ dari pendapatan

c) Pendidikan

Suatu pendidikan merupakan bimbingan ataupun pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar beranggapan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial pemerintah bersama orang tua yang telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa.

Menurut menteri pendidikan, pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d) Kesehatan Masyarakat

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan suatu kesejahteraan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi pada suatu wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktifitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian, menurunkan pravelansi gizi buruk, serta meningkatkan angka harapan hidup, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan tingkat kesehatan yang baik.

e) Perumahan masyarakat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan

manusia sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan penduduk. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Menurut biro pusat statistik dikatakan perumahan yang sejahtera apabila luas lantainya lebih dari 10m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

B. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil eksplo awal tentang penelitian yang sejenis dengan kajian ini menunjukkan, bahwa penelitian ini bukanlah studi pertama seputar Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Meskipun demikian peneliti terdahulu menunjukkan ketidaksamaan tema dan fokus kajian dengan penelitian ini. Untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka akan dipaparkan secara singkat beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang ditulis oleh Ade Eka Kurniawan, program studi ilmu pemerintahan.⁴⁷ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung pinang, 2016 dengan judul jurnal “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (desa Lanut Kecamatan Sungkep pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)”. Keunikan dalam penelitian ini adalah

⁴⁷Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji : Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,2016), hlm. 25.

peningkatan pendapatan asli desa Lanjut Kecamatan Sengkep Pesisir Kabupaten Lingga dapat diperoleh melalui Badan Usaha milik Desa (bumdes). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian deskriptif kualitatif dengan menganalisa dan menginterpretasi data. Sementara itu, hasil dalam penelitian ini adalah peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam peningkatan pendapatan sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ketahun ada mengalami peningkatan dan penurunan dengan acuan indikator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian ini, adapun indikatornya yaitu sebagai berikut : peranan bumdes sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai dinamisator.

2. Penelitian yang ditulis oleh Yuliantika Dirgantara, program studi administrasi publik, Universitas Brawijaya, 2017.⁴⁸ Dengan judul "*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus pada BUMDes Jatiguwi Kecamatan Sumber pucung Kabupaten Malang*". Keunikan pada penelitian ini adalah peran untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggunakan peran BUMDes jatiguwi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, metode ini dipilih karena dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan kata-kata atau gambar tentang peran BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa Jatiguwi. Hasil dari penelitian ini adalah peran BUMDes sebagai fasilitator yaitu a. perencanaan usaha yang akan dibangun yang diharapkan bisa

⁴⁸Yuliantika Dirgantara, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Publik : Univesititas Brawijaya, 2017), hlm. 96.

meningkatkan taraf hidup masyarakat, b. memfasilitasi pembangunan usaha yaitu dengan unit usaha simpan pinjam, c. memfasilitasi pembangunan usaha untuk meningkatkan padas dengan cara dari hasil unit usaha simpan pinjam tersebut akan menghasilkan bunga yang nantinya akan dibagikan secara rata kepada anggota BUMDes dan PADes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penelitian yang ditulis oleh Valentina Queen Chintary, dan Asih Widi Lestari, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6969, Vol. 5. No. 2, 2016.⁴⁹ Yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”. Keunikan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah Desa Bumaji dalam mengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bumiaji seperti pemberian pinjaman modal usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode analisa data menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu, peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDES yakni sebagai pembentukan dan pengembangan bumdes. Sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Batuaji dalam mengelola BUMDES yaitu :

- a. Sebagai fasilitator, yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberikan fasilitas BUMDES

⁴⁹Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2, 2016), hlm. 60.

- b. Peran pemerintah Desa sebagai Mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap pengurus BUMDES
 - c. Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dan memberikan sosialisasi kepada masing masing pengurus BUMDES agar mampu mengelola BUMDES sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
 - d. Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP)
4. Penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani, Jurnal Akutansi dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora (Universitas Dhayana Pura), 2018.⁵⁰ Dengan judul “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Desa Tibuneng Kuta Utara)”. Keunikan dalam penelitian ini adalah Peranan Bumdes Genth Persada dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tibuneng Kuta Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif yang bersifat kualitaif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan BUMDES Genth Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, *money charger*, dan perdagangan.

⁵⁰Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara*, (Universitas Dhyana Pura Bali, Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora Vo;. 9 No. 2, , 2019), hlm 42.

Bumdes juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubuneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu Bumdes Genta Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ratna Azis Prasetyo (2017), melakukan penelitian yang berjudul "*Peran Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*".⁵¹ Keunikan dalam penelitian ini peran bumdes untuk pembangunan dan pemberdayaan desa Pejambon. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat Desa Pejambon dalam pemanfaatan BUMDes
 - a. Untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDES di desa Pejambon
 - b. Untuk mengetahui kontribusi bumdes di desa Pejambon dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDES masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama anggaran BUMDES.

⁵¹Ratna Azis Prasetyo, *Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*, (Universitas Airlangga : Jurnal Dialektika Volume XI No. 1, 2016), hlm. 90.

6. Penelitian yang ditulis oleh Maria Rosa Ratnasari Sri Anggraeni (2016), melakukan penelitian yang berjudul “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta*”.⁵² Keunikan dalam penelitian ini peran bumdes untuk melihat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Kidul Yogyakarta . Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* yang dilakukan secara kualitatif. Dengan kesimpulan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk pendapatan asli desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini:

Judul		Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan		
Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (desa Lanut Kecamatan Sungkep pesisir Kabupaten Lingga	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)	a. Penelitian ini sama sama meneliti tentang peran Bumdes b. Penelitian ini sama sama menggunakan metode peneltian kualitatif c. Penelitian ini sama sama menggunakan indikator fasilitator,	a. Penelitian terdahulu fokus penelitian pada peningkatan pendapatan asli Desa, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian peningkatan kesejahteraan masyarakat b. Menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa dan mengiterprestasi data sedangkan, menggunakan pendekatan penelitian fenomologi naturalistik.

⁵²Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal MODUS Vol. 28 (2): 155-167, 2016), hlm. 160.

Judul		Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan		
		mediator	c. Penelitian ini menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sambitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMdes dengan 3 unit usaha BUMDes
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus pada BUMDes Jatiguwi Kecamatan Sumber pucung Kabupaten Malang	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)	a. Penelitian ini sama sama menggunakan metode peneltian kualitatif deskriptif b. Peran BUMDes sebagai fasilitator sama sama merencanakan usaha yang akan dibangun, memfasilitasi pengembangan usaha dengan simpan pinjam	a. Fokus penelitian pada peningkatan pendapatan asli desa, sedangkan fokus penelitian pada kesejahteraan masayarakat desa, b. Penelitian ini menekankan bahwadalam meningkatkan pades melalui peran bumdes sebagai fasilitator yaitu perencanaan pembangunan usaha, simpan pinjam, dan memberikan laba dari simpan pinjam kepada anggota bumdes dan juga pades. BUMDes Desa Sambitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 3 unit usaha BUMDes, dan juga 3 peran bumdes fasilitotor, motivator, mediator.
Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkat kesejahteraan masyarakat desa	a. Penelitian ini sama sama menggunakan metode peneltian kualitatif b. Penelitian ini sama sama	a. Pada penelitian tedahulu fokus pembahasan peran pemerintah desa untuk mengelola BUMDES, sedangkan penelitian ini peran BUMDES untuk meningkatkan

Judul		Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan		
	(studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)	menggunakan indikator fasilitator, mediator	kesejahteraan masyarakat desa b. Penelitian ini menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sambitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 3 unit usaha BUMDes
Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Desa Tibuneng Kuta Utara)	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)	a. Penelitian ini sama sama meneliti tentang peran Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif	a. Penelitian terdahulu menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDesma Desa Tibuneng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha simpan pinjam, jasa sampah, <i>money charger</i> , dan perdagangan. Bumdes juga menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan penelitian ini menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sambitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 3 unit usaha BUMDes
Peran Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a. Sama sama meneliti tentang peran Bumdes	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif b. Penelitian terdahulu

Judul		Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan		
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro	desa (studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)		<p>mengkaji peran bumdes untuk pembangunan dan pemberdayaan desa Pejambon, penelitian ini untuk mengetahui peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>c. Penelitian ini menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sambitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 3 unit usaha BUMDes</p>
Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta	Peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus : bumdes desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)	a. Penelitian ini sama sama meneliti tentang peran BUMDes untuk melihat kesejahteraan masyarakat desa	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan metode Community Based Research, sedangkan penelitian ini menggunakan metode fenomena naturalistic</p> <p>b. keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk pendapatan asli desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa, BUMDes Desa Sambitan mempunyai 3 unit usaha yang akan mensejahterakan masyarakat desa.</p>

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang mendasari pemahaman-pemahaman di dalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : BUMDes Desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)

Untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Desa Sambitan BUMDes Sambitan mempunyai tiga unit bidang usaha yaitu simpan pinjam, SAM-SAM (Sumber Air Minum) dan Pom mini. Lembaga Bumdes melakukan kegiatan pendekatan, pembinaan, pendampingan. Apa saja potensi-potensi yang ada di Desa Sambitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendirikan usaha. Dengan cara, Bumdes Sambitan mendirikan sebuah BUMDes yang diberi nama BUMDes Sami Rukun pada BUMDes, unit usaha yang sangat populer adalah simpan pinjam yang maksimal peminjaman dananya adalah RP. 10.000.000 dengan pengembaliannya diangsur selama 3 bulan.

Pengelolaan BUMDES Desa Sambitan pada dasarnya harus bertujuan dalam pembangunan Desa Sambitan itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan Desa. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri mencakup

pengertian, bahwa seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan sehari-hari.

Gambar Kerangka Berpikir

Untuk menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Desa bisa mendirikan BUMDES, berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha Desa. Badan Usaha Milik Desa berdiri dengan dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUM Desa.

BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dan dibawah ini adalah gambar kerangka pikir yang akan menjelaskan tentang peran-peran dalam Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa, serta untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh BUMDES Sambitan, yang terdiri dari :

1. Peran BUMDES Sami Rukun sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan

2. Peran BUMDES Sami Rukun sebagai mediator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan
3. Peran Sami Rukun BUMDES sebagai motivator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan
4. Faktor Pendukung dari BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan
5. Faktor Penghambat dari BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjalankan ketiga peran tersebut dengan memperhatikan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan faktor penghambat tersebut maka piha BUMDes dapat meminimalkan atau mencari solusi untuk faktor penghambat dari proses peningkatan kesejahteraan Desa.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

